

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2019:11) menyatakan bahwa audit internal merupakan:

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”

Kemudian, menurut Soemarso Slamet Rahardjo (2019:346) memaparkan bahwa audit internal adalah:

“Suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.”

Berdasarkan kedua definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu rangkaian proses pemeriksaan sistematis yang dilakukan secara independen dan objektif oleh bagian internal audit suatu perusahaan dalam rangka mengevaluasi seluruh kegiatan operasional perusahaan apakah telah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan juga menjadi suatu nilai tambah bagi operasional perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Menurut Hery (2017:239) mengemukakan bahwa audit internal memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran, dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Kemudian, ia juga berpendapat bahwa audit internal memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aset perusahaan dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

2.1.1.3 Ruang Lingkup dan Indikator Audit Internal

Menurut Hery (2017:270) mengemukakan bahwa ruang lingkup audit internal adalah:

“Ruang lingkup audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi.”

Kemudian dalam pelaksanaannya, audit internal menurut Hery (2017:281) memiliki fungsi untuk meyakinkan:

1. Keandalan informasi

Pemeriksa internal harus meninjau keandalan (reliabilitas dan integritas) berbagai informasi finansial dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melapor informasi.

2. Kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan

Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki. Jadi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam menentukan apakah sistem tersebut telah mencakupi dan efektif serta apakah berbagai kegiatan yang diperiksanya benar-benar telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

3. Perlindungan terhadap aset organisasi

Pemeriksa internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aset terhadap berbagai jenis kerugian seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal atau tidak pantas dan, bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan suatu aset. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aset, pemeriksa harus mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien

Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan seperti:

- a. Fasilitas-fasilitas yang tidak dipergunakan sepenuhnya
- b. Pekerjaan yang tidak produktif
- c. Berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan biaya, dan
- d. Terlalu banyak atau sedikitnya jumlah staf

5. Pencapaian tujuan

Permeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2.1.2 Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Arens dkk (2020:343) menegaskan bahwa pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Internal control consists of policies and procedures designed to provide management with reasonable assurance that the company achieves its objectives and goals. These policies and procedures are often called controls, and collectively, they make up the entity's internal control.”

Selanjutnya, menurut Ely Suhayati (2021:174) berpendapat bahwa pengendalian internal ialah:

“Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut yaitu kendalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan yang terakhir adalah efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan pokok struktur pengendalian intern tersebut dapat dipenuhi dengan pengendalian yang baik. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi, sedangkan tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik.”

Berdasarkan kedua definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang di mana terdiri atas kebijakan-kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen, yang di mana meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang digunakan oleh perusahaan yang di mana bertujuan untuk menjaga aset-aset perusahaan dan membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Ely Suhayati (2021:174) mengemukakan bahwa pengendalian internal memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Akuntansi

Meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan pengamanan aset, yang disusun untuk meyakinkan bahwa:

- a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan.
- b. Transaksi dicatat sehingga dapat dibuat ikhtisar keuangan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia serta menekankan pertanggungjawaban atas aset perusahaan.
- c. Penguasaan atas aset diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi pimpinan.
- d. Jumlah aset dalam catatan dicocokkan dengan aset yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan.

2. Pengendalian Administratif

Pengendalian yang ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan, dapat berupa rencana organisasi dan prosedur juga catatan yang relevan dengan pembuatan keputusan yang mengantarkan pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau memberi wewenang terhadap transaksi-transaksi, pelimpahan wewenang merupakan fungsi pimpinan perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan itu merupakan titik tolak untuk menciptakan pengendalian akuntansi atas transaksi.

Menurut Arens dkk (2020:343) berpendapat bahwa pengendalian internal memiliki tiga tujuan utama sebagai berikut:

1. *Reliability of reporting*

Management is responsible for preparing financial statements for investors, creditors, and other users. Management has both a legal and professional responsibility to be sure that the information is fairly presented in accordance with reporting requirements of accounting frameworks such as U.S. GAAP and IFRS. The objective of effective internal control over financial reporting is to fulfill these financial reporting responsibilities.

2. *Efficiency and effectiveness of operations*

Controls within a company encourage efficient and effective use of its resources to optimize the company's goals. An important objective of these controls is accurate financial and non-financial information about the company's operations for decision making.

3. *Compliance with laws and regulations*

Section 404 requires management of all public companies to issue a report about the operating effectiveness of internal control over financial reporting. In addition to the legal provisions of Section 404, public, nonpublic, and not-for-profit organizations are required to follow many laws and regulations. Some relate to accounting only indirectly, such as environmental protection and civil rights laws. Others are closely related to accounting, such as income tax regulations and antifraud legal provisions.

2.1.2.3 Indikator Pengendalian Internal

Menurut Arens dkk (2020:347) *Internal Control-Integrated Framework* yang dikeluarkan COSO berpendapat bahwa pengendalian internal memiliki lima komponen yang di mana sebagai berikut:

1. *Control Environment*

The control environment consists of the actions, policies, and procedures that reflect the overall attitudes of top management, directors, and owners of an entity about internal control and its importance to the entity. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

a. *Integrity and Ethical Values*

Integrity and ethical values are the product of the entity's ethical and behavioral standards, as well as how they are communicated and reinforced in practice.

b. *Board of Director or Audit Committee Participation*

The board of directors is essential for effective corporate governance because it has ultimate responsibility to make sure management implements proper internal control and financial reporting processes.

c. *Organizational Structure*

The entity's organizational structure defines the existing lines of responsibility and authority.

d. *Commitment to Competence*

Competence is the knowledge and skills necessary to accomplish tasks that define an individual's job.

e. *Accountability*

Management and the board of directors are responsible for communicating expectations and holding individuals accountable for internal control duties.

2. *Risk Assessment*

Risk assessment involves a process for identifying and analyzing risks that may prevent the organization from achieving its objectives. The four underlying principles related to risk assessment are that the organization should have clear objectives in order to be able to identify and assess the risks relating to those objectives; should determine how the risks should be managed; should consider the potential for fraudulent behavior; and should monitor changes that could impact internal controls.

3. *Control Activities*

Control activities are the policies and procedures, in addition to those included in the other four control components, that help ensure that necessary actions are taken to address risks to the achievement of the entity's objectives. The control activities generally fall into the following five types, which are:

- a) *Adequate separation of duties*
- b) *Proper authorization of transactions and activities*
- c) *Adequate documents and records*
- d) *Physical control over assets and records*
- e) *Independent checks on performance*

4. *Information and Communication*

The purpose of an entity's accounting information and communication system is to initiate, record, process, and report the entity's transactions and to maintain accountability for the related assets.

5. *Monitoring*

Monitoring activities deal with ongoing or periodic assessment of the quality of internal control by management to determine that controls are operating as intended and that they are modified as appropriate for changes in conditions. For many companies, especially larger ones, an internal audit department is essential for effective monitoring of the operating performance of internal controls. To be effective, the internal audit function must be performed by staff who are independent of both the operating and accounting departments and who report directly to a high level of authority within the organization, either top management or the audit committee of the board of directors.

2.1.3 Pencegahan Fraud

2.1.3.1 Pengertian Fraud

Menurut Saporta dkk (2022:55) memaparkan bahwa pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut:

“Fraud prevention is in research identification (through fraud analysis, modeling, reverse engineering, etc.) and mitigation—and balancing that process with avoiding friction for good customers as much as possible.”

Selanjutnya, menurut Arens dkk (2020:305) berpendapat bahwa *fraud* ialah:

“Fraud describes any intentional deceit meant to deprive another person or party of their property or rights. In the context of auditing financial statements, fraud is defined as an intentional misstatement of financial statements. The two main categories are fraudulent financial reporting and misappropriation of assets.”

Berdasarkan kedua definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara mengambil harta atau hak pihak lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kecurangan, penyelewengan, pencurian, penyogokan, manipulasi, penggelapan, penjarahan, penipuan, penyelundupan, salah saji.

2.1.3.2 Tipe-Tipe Fraud

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Ely Suhayati (2021:89) tipe-tipe *fraud* adalah sebagai berikut:

1. *Corruption* (Korupsi)

Terdiri dari ranting-ranting:

- a. *Conflicts of Interest* (Benturan Kepentingan)
- b. *Bribery* (Penyuapan)
- c. *Illegal Gratuities*

Pemberian hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan.

- d. *Economic Extortion*

2. *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset)

Cabang-cabang dari penggelapan ini adalah:

- a. *Cash*

Sasaran penjarahan adalah uang kas maupun di bank yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pelakunya. *Asset Misappropriation* dalam bentuk penjarahan kas dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:

1. *Larceny*

Kalau uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian dicuri maka *fraud* ini disebut *larceny* atau pencurian.

2. *Fraudulent disbursement*

Jika penggelapan dilakukan pada saat arus uang sudah terekam dalam sistem maka penggelapan ini disebut *fraudulent disbursement*.

3. *Skimming*

Dalam *skimming* uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan.

b. *Inventory and All Other assets*

Aset lainnya juga bisa menjadi sasaran adalah aktiva tetap. Modus operandi dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah *misuse* dan *larceny*. *Misuse* adalah penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tetapi jika apa yang disalahgunakan tersebut tidak dikembalikan maka dikatakan sebagai *larceny*.

3. *Fraudulent Statements* (Salah Saji Laporan)

Terbagi atas:

1. Financial

Salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Ini merupakan *fraud* yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan salah saji, *misstatements* baik *overstatements* maupun *understatements*. *Overstatements* merupakan salah saji aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kemudian, *understatements* adalah salah saji aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya.

Kecurangan ini mencakup tindakan seperti:

- a. Manipulasi, pemalsuan, dan penggelapan data akuntansi dan dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.

- b. Representasi yang salah atau dihilangkannya peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
- c. Penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja, berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

2. Non Financial

Penyampaian laporan non keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan sering kali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern maupun ekstern. Misalnya perusahaan yang mengklaim tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi masyarakat, keadaan tersebut ternyata bukanlah keadaan yang sebenarnya.

2.1.3.3 Indikator Pencegahan Fraud

Menurut Theodorus Martin Tuanakotta (2016:207) terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*, faktor tersebut adalah:

1. *Pressure* (Tekanan)

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah, tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Setidak-tidaknya, itulah yang dirasakannya. Konsep ini dalam bahasa Inggris disebut *perceived non-shareable financial need*.

2. *Opportunity* (Peluang)

Non-shareable financial problem menciptakan motif bagi terjadinya kejahatan. Akan tetapi, pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Persepsi ini, adalah *opportunity* atau peluang.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rationalization atau mencari pembenaran tercipta sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. *Rationalization* diperlukan agar si pelaku mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, *rationalization* ini ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi.

Menurut Karyono (2013:61) terdapat tiga cara dalam melakukan pencegahan *fraud*, yang di mana sebagai berikut:

1. Mengurangi *pressure* situasional yang menimbulkan kecurangan
 - a. Hindari tekanan eksternal yang menggoda pegawai akunting untuk menyusun laporan keuangan yang menyesatkan.
 - b. Hilangkan hambatan operasional yang menahan kinerja keuangan yang efektif seperti pembahasan modal kerja, pembatasan persediaan.
 - c. Tetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam.
 - d. Hilangkan tekanan keuangan dengan penggajian memadai.
 - e. Ciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menghargai prestasi kerja.

2. Mengurangi *opportunity* melakukan kecurangan
 - a. Peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaannya.
 - b. Ciptakan catatan akuntansi yang akurat dan jelas dan berfungsi secara kendali.
 - c. Pantau secara hati-hati transaksi bisnis dan hubungan pribadi.
 - d. Tetapkan pengaman fisih terhadap aset dan inventarisasi fisik secara berkala dan pengamanan lokasi/tempat penyimpanan.
 - e. Lakukan pemisah fungsi diantara pegawai sehingga ada pemisahan otorisasi penyimpanan dan pencatatan.
 - f. Peliara catatan personalia yang akurat dan lakukan pengujian latar belakang pegawai baru.
 - g. Penetapan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan.
 - h. Tetapkan sistem penilaian prestasi kerja yang adil.
3. Mengurangi *rationalization* melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai
 - a. Ada aturan prilaku jujur dan tidak jujur harus diidentifikasi dalam kebijakan organisasi.
 - b. Ada contoh perilaku jujur dari para manajer dan berperilaku seperti apa yang mereka inginkan.
 - c. Ada aturan sanksi tugas dan jelas bila ada penyimpangan aturan bagi pelakunya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:65) menjelaskan bahwasanya audit internal memiliki peranan yang penting dalam melakukan pemantauan untuk memastikan agar program dan pengendalian *anti fraud* telah berjalan efektif. Di samping itu juga, aktivitas fungsi dari audit internal dapat melakukan upaya pencegahan sekaligus mengatasi *fraud*.

Berdasarkan penelitian Komang Yoga Mahendra dkk (2021), Resi Gustiani Putri dkk (2021), dan Ike Trijayanti (2021) menyatakan bahwa audit internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

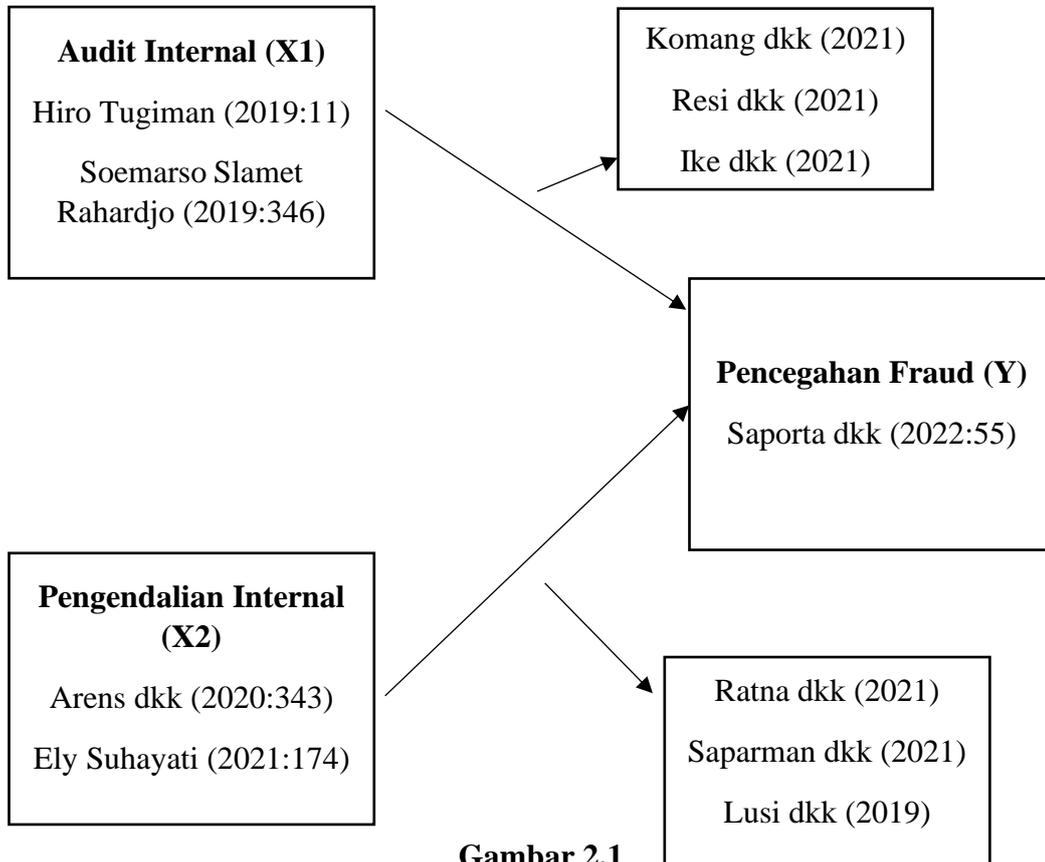
2.2.2 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:33) menerangkan bahwasanya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan memperkecil kesempatan untuk melakukan *fraud* dengan pengimplementasian pengendalian internal yang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari dkk (2021), Saparman dkk (2021), dan Lusi Andari (2019) mengatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan dari hasil kerangka pemikiran di atas, maka paradigma penelitiannya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di kerangka pemikiran, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*

H₂ : Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*